



Analisis *Bottom-Up* Diplomasi Maritim dalam Domain Kebijakan Sektor Pariwisata Bahari di Kab Bantaeng

Muh. Ibnu Bintang^{1*}, Seniwati Seniwati²

¹⁻²Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Kota Makassar

Korespondensi penulis: ibnubintang313@gmail.com*

Abstract. *This research discusses the potential and challenges of marine tourism development in Bantaeng Regency through a bottom-up analysis of maritime diplomacy in the policy domain of the marine tourism sector in Bantaeng, South Sulawesi. This study uses a qualitative descriptive approach through secondary data analysis. The results show that the development of marine tourism in Bantaeng is supported by natural beauty, cultural diversity, and local government commitment through a bottom-up approach, which places the community as the main actor in sustainable tourism development. The research also identified a number of challenges, such as limited resources, low community awareness of tourism potential, and inconsistent community participation.*

Keywords: *marine tourism, sustainable development, maritime diplomacy, Bantaeng regency, bottom-up approach.*

Abstrak. Penelitian ini membahas potensi dan tantangan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Bantaeng melalui analisis bottom-up diplomasi maritim dalam domain kebijakan sektor pariwisata bahari di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata bahari di Bantaeng didukung oleh keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan komitmen pemerintah daerah melalui pendekatan bottom-up, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata, dan partisipasi masyarakat yang belum konsisten.

Kata kunci: pariwisata bahari, pembangunan berkelanjutan, diplomasi maritim, Kabupaten Bantaeng, pendekatan bottom-up.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, dengan panjang pantai mencapai 99.083 Km . Sedangkan luas laut Indonesia menurut UNCLOS adalah 3.257.357 Km (Supriyanto, 2022, p. 138). Situasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor pariwisata. Pengelolaan pariwisata di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek, memerlukan pendekatan yang lebih optimal, salah satunya melalui pengembangan wisata bahari seperti pantai.

Masyarakat adalah salah satu komponen utama dalam sistem pengembangan destinasi wisata, dan saat ini keterlibatannya semakin menjadi tuntutan. Pada dasarnya, model pengembangan berbasis partisipasi masyarakat telah lama diperkenalkan, di mana masyarakat ditempatkan sebagai aktor utama dalam proses pengembangan yang sedang dan akan dilaksanakan. Namun, implementasi model ini masih menghadapi berbagai kelemahan.

(Wulandari, 2020, p. 11). Ini mengindikasikan bahwa meskipun konsep partisipasi masyarakat telah diterima, pelaksanaannya sering terhambat oleh keterbatasan koordinasi, sumber daya, dan pemahaman yang cukup di tingkat lokal.

Salah satu sektor pariwisata yang terus dikembangkan oleh pemerintah Bantaeng adalah wisata bahari, yang meliputi objek wisata yang berkaitan dengan pantai dan laut. Salah satu pantai yang terus mendapatkan perhatian pengembangan adalah Pantai Marina. Pantai ini telah ada sejak tahun 2012 dan terletak di Dusun Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Sejak awal pembangunan hingga saat ini, pengembangan Pantai Marina terus menunjukkan kemajuan. Pantai Marina dipilih untuk terus dikembangkan karena memiliki pemandangan matahari terbenam dan merupakan salah satu pantai pertama di Sulawesi Selatan yang dilengkapi dengan fasilitas modern (Wulandari, 2020, p. 10). Selain itu, pengembangan yang terus dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, memperkuat perekonomian lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Menurut data dari BPS Kabupaten Bantaeng (2018), jumlah wisatawan yang mengunjungi Pantai Marina terus meningkat setiap tahun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, Pantai Marina dikunjungi oleh 1.113 orang, yang terdiri dari 48 wisatawan mancanegara dan 1.065 wisatawan domestik. Angka ini meningkat pada 2015, mencapai 5.359 pengunjung, dengan 73 wisatawan mancanegara dan 5.286 wisatawan domestik. Pada 2016, jumlah kunjungan naik lagi menjadi 7.090 orang, terdiri dari 68 wisatawan mancanegara dan 7.022 wisatawan domestik. Puncaknya terjadi pada 2017, ketika Pantai Marina dikunjungi oleh 12.336 orang, termasuk 237 wisatawan mancanegara dan 12.099 wisatawan domestik. Peningkatan jumlah pengunjung ini menunjukkan bahwa Pantai Marina semakin populer, baik di kalangan wisatawan lokal maupun internasional. Kemudian, pada tahun 2018, kunjungan wisatawan mencapai 32.742 orang, dengan 1.798 wisatawan mancanegara dan 30.926 wisatawan nusantara. Total kunjungan wisatawan dari tahun 2014 hingga 2018 mencapai 58.640 orang (Ramlan, 2021, p. 60-61). Hal ini jelas menunjukkan bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Bantaeng, khususnya di objek wisata Pantai Marina, telah mengalami kemajuan dan peningkatan. Progres tersebut terlihat dari berbagai peristiwa dan situasi yang terjadi, mencakup berbagai bidang kehidupan dan lingkungan sekitarnya.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan dalam sektor pariwisata bahari di Kabupaten Bantaeng, serta tantangan dan peluang yang ada. Pendekatan bottom-up diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana masyarakat lokal dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam menganalisis Bottom-Up Diplomasi Maritim dalam Domain Kebijakan Sektor Pariwisata Bahari di Kabupaten Bantaeng, penulis menggunakan konsep dan teori sebagai landasan berpikir. Konsep utama yang diterapkan adalah Bottom-Up Planning, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, penulis juga menggunakan teori Diplomasi Maritim sebagai kerangka analisis utama. Teori ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya maritim sebagai instrumen hubungan diplomasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Bottom-Up Planning

Pendekatan bottom-up, yang juga dikenal sebagai pendekatan partisipatif, merupakan proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, pendekatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Pendekatan ini tidak hanya memastikan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan prioritas pembangunan, tetapi juga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan atau program yang dirancang (WY Rompas, 2015, p.57).

Dalam tulisan Marzuki (2004) pendekatan bottom-up atau partisipatif dalam paradigma pembangunan didasarkan pada dua perspektif utama yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan ini menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat setempat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari pemilihan, perancangan, hingga pelaksanaan program atau proyek yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Kedua, pendekatan ini juga menggarisbawahi pentingnya penyediaan mekanisme umpan balik (feedback) terhadap program atau proyek yang dijalankan. Umpan balik tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan. Kedua perspektif ini menciptakan paradigma pembangunan yang inklusif, memberdayakan masyarakat, dan responsif terhadap kebutuhan lokal (WY. Rompas, 2015, p.58)

Konsep ini relevan dalam konteks Kabupaten Bantaeng, karena pengelolaan sektor pariwisata bahari membutuhkan keterlibatan langsung dari komunitas setempat, seperti nelayan, pengusaha kecil, dan kelompok masyarakat adat. Melalui pendekatan bottom-up, masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang memberikan masukan, memengaruhi kebijakan, dan turut bertanggung jawab atas keberlanjutan pariwisata bahari.

Teori Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim adalah konsep yang cukup terbilang baru dalam kajian diplomasi dan hubungan internasional, yang semakin relevan seiring dengan peningkatan perhatian global terhadap isu-isu maritim. Konsep ini memandang lautan dan wilayah maritim sebagai elemen strategis yang penting dalam mengelola hubungan antarnegara, baik di tingkat regional maupun global. Dalam praktiknya, diplomasi maritim tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik terkait wilayah laut, tetapi juga sebagai pendekatan yang lebih luas untuk membangun kebijakan yang berfokus pada kerjasama yang konstruktif di sektor maritim. Ini mencakup pengelolaan sumber daya laut, perdagangan maritim, serta keamanan dan keberlanjutan lingkungan laut. Dengan demikian, diplomasi maritim bertujuan untuk memperkuat hubungan antarnegara dengan cara yang saling menguntungkan, melalui dialog, negosiasi, dan kolaborasi dalam menghadapi tantangan bersama di wilayah laut (Sanjiwani, et al, 2022, p.27).

Diplomasi maritim adalah pendekatan strategis dalam hubungan internasional yang memanfaatkan potensi sumber daya maritim dan infrastruktur kelautan untuk mencapai tujuan diplomatik antarnegara. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik atau ketegangan yang berhubungan dengan wilayah maritim, seperti sengketa perbatasan laut, tetapi juga berfokus pada memperkuat kerjasama internasional di berbagai sektor. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti keamanan maritim, perdagangan antarnegara yang melibatkan jalur laut, serta pengelolaan bersama terhadap sumber daya laut yang vital bagi keberlanjutan ekonomi dan ekosistem global. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, mengingat kompleksitas isu yang terkait dengan wilayah maritim (Setiawan & Zaman, 2020, p.7).

Diplomasi maritim dilakukan dengan berbagai cara, seperti negosiasi untuk mencapai kesepakatan terkait batas laut, pengelolaan sumber daya, atau perlindungan lingkungan. Selain itu, diplomasi juga dilakukan melalui publikasi, yaitu menyebarkan informasi tentang kebijakan atau potensi maritim untuk menarik perhatian dan dukungan. Tidak hanya antar pemerintah, diplomasi ini juga melibatkan aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal. Dengan melibatkan berbagai pihak, diplomasi maritim membantu menciptakan solusi yang lebih baik untuk masalah kelautan, seperti keamanan, pengelolaan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan (Hanggarini, et al., 2022, p.170).

Dalam konteks Bantaeng, diplomasi maritim dapat dilihat dari bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat lokal menggunakan potensi pariwisata bahari untuk menarik perhatian wisatawan domestik maupun internasional, sekaligus menjalin kerjasama dengan aktor-aktor global, seperti organisasi internasional atau sektor swasta. Teori ini juga membantu menjelaskan bagaimana pelestarian lingkungan laut, budaya maritim, dan pengembangan ekonomi lokal dapat menjadi bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode kajian pustaka sebagai pendekatan utama. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan konsep bottom-up dan diplomasi maritim serta implementasinya dalam kebijakan sektor pariwisata bahari. Kajian pustaka ini mencakup penelaahan terhadap teori-teori yang mendasari diplomasi maritim, pendekatan bottom-up dalam perumusan kebijakan, serta kasus-kasus serupa yang pernah diterapkan di daerah lain atau di tingkat nasional. Dalam konteks Kabupaten Bantaeng, analisis dilakukan dengan mengambil data sekunder dari jurnal, buku, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi lain yang relevan, guna mendapatkan wawasan tentang potensi, tantangan, serta peran aktor lokal dalam pengembangan pariwisata bahari berbasis diplomasi maritim. Dengan menggunakan metode ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran konseptual yang komprehensif sekaligus memberikan dasar argumentasi untuk menjelaskan hubungan antara pendekatan bottom-up dengan upaya diplomasi maritim dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata bahari di Kabupaten Bantaeng.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Tantangan Pariwisata Bahari di Bantaeng

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi besar di bidang pariwisata alam dan budaya. Letak geografisnya yang unik memberikan keunggulan tersendiri bagi pengembangan sektor pariwisata. Wilayah ini memiliki garis pantai yang membentang di sisi barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer, menawarkan panorama pesisir yang memukau dan potensi besar untuk wisata bahari. Selain itu, bagian utara Kabupaten Bantaeng didominasi oleh dataran tinggi pegunungan yang menyajikan pemandangan alam yang asri dan sejuk, cocok untuk wisata alam pegunungan. Sementara itu, di bagian selatan, terdapat dataran rendah yang meliputi kawasan pesisir pantai serta area persawahan, menciptakan kombinasi lanskap alam yang harmonis. Dengan luas wilayah mencapai 395,83 km², Kabupaten Bantaeng tidak hanya menawarkan keindahan alam yang

beragam, tetapi juga warisan budaya yang kaya, menjadikannya destinasi wisata yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut (Hamid & Fattah, 2024, p.86-87)

Kabupaten Bantaeng memiliki beragam destinasi wisata alam yang meliputi tiga pantai yang indah, sembilan air terjun yang memukau, satu permandian alam yang menyegarkan, dan dua hutan desa yang kaya akan keanekaragaman hayati. Kekayaan alam yang dimiliki daerah ini menawarkan potensi besar untuk menarik wisatawan dari berbagai kalangan. Meskipun demikian, jumlah wisatawan yang berkunjung, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, masih belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa potensi besar yang dimiliki oleh daerah ini belum sepenuhnya dimanfaatkan atau dikenal oleh banyak orang (Hamid & Fattah, 2024, p.88).

Untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng telah mengambil berbagai langkah strategis dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperbaiki jalan menuju destinasi wisata unggulan seperti pantai dan air terjun. Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, sehingga perjalanan wisatawan menjadi lebih mudah, nyaman, dan aman. Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan pembangunan fasilitas umum yang memadai di sekitar lokasi wisata. Fasilitas seperti toilet yang bersih, area parkir yang luas dan terorganisir, serta tempat istirahat yang nyaman telah menjadi fokus utama untuk mendukung pengalaman wisata yang lebih baik (Berita Resmi Kabupaten Bantaeng Indonesia 2024).

Masyarakat lokal memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bantaeng. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengelola objek wisata, tetapi juga berfungsi sebagai mitra dalam setiap langkah pengembangan pariwisata. Keterlibatan masyarakat mencakup berbagai aspek, mulai dari pelestarian budaya dan lingkungan hingga penyediaan jasa lokal, penjualan produk, dan penentu kebijakan. Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal menjadi langkah utama untuk mengoptimalkan potensi wisata yang ada. Dengan demikian, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat (Berita Resmi Kabupaten Bantaeng Indonesia 2024).

Penerapan Pendekatan Bottom-Up Diplomasi Maritim dalam Pembuatan Kebijakan Sektor Pariwisata Bahari di Kabupaten Bantaeng

Pendekatan bottom-up menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam setiap tahap proses pembuatan kebijakan. Kebijakan pemerintah, yang umumnya dirumuskan berdasarkan prioritas nasional atau regional,

memberikan arah strategis dan kerangka kerja bagi pelaksanaan pembangunan. Namun, kebijakan ini akan lebih efektif jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang aktif. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi nyata mereka. Proses pelibatan ini menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan artikulasi yang lebih baik terhadap permasalahan dan harapan masyarakat lokal (Mawara, 2014, p.3).

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng telah tertuang dalam RPJMD 2013-2018 dan diperbarui pada 2018-2023 dengan salah satu misi utamanya adalah mengembangkan jaringan perdagangan, industri, dan pariwisata melalui konsep "The New Bantaeng." Pengembangan sektor pariwisata dirangkum dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), yang disusun bersama akademisi dan tenaga ahli sebagai pedoman pembangunan kepariwisataan sesuai UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Setelah RIPPARDA, pemerintah daerah bersama BPPT menyusun Detail Engineering Design (DED) kawasan wisata, seperti DED Kawasan Technopark pada 2016, dengan sasaran mencakup peningkatan infrastruktur, pengembangan pasar, optimalisasi pelabuhan, dan promosi usaha berbasis home industry untuk menjadikan Bantaeng sebagai tujuan wisata unggulan di Sulawesi Selatan (Yuliawan & Aly, 2020).

Salah satu fokus utama pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantaeng adalah sektor wisata bahari, yang berkaitan erat dengan keindahan pantai dan laut. Pengembangan sektor ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas formalitas, tetapi telah menjadi prinsip utama yang harus terintegrasi dalam setiap kebijakan dan proyek pariwisata (Wulandari, et al., 2020, p.10)

Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan berbagai program pengembangan objek wisata. Salah satu fokus utama pengembangan adalah Pantai Marina, yang dirancang sesuai dengan kebijakan kepariwisataan di tingkat daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata, tetapi juga untuk memperkuat peran masyarakat setempat dalam pengambilan kebijakan dan pengembangan destinasi wisata. Upaya ini telah membawa perubahan positif pada masyarakat, terutama dalam hal pandangan, wawasan, pengetahuan, kesadaran, dan perilaku mereka terhadap pengembangan wisata bahari. Dengan adanya program-program pemerintah daerah, masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan pantai dan mendukung

pembangunan wisata sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Wulandari, et al., 2020, p.12).

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata bahari di Kabupaten Bantaeng menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan keberhasilan pembangunan sektor pariwisata. Masyarakat memiliki hak yang besar untuk menentukan, merencanakan, dan berperan langsung dalam pengelolaan wisata, karena mereka adalah pihak yang paling memahami kondisi dan tantangan wilayahnya, sekaligus pihak yang merasakan dampak langsung dari pengembangan pariwisata tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan, wisata bahari dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat lokal sekaligus membantu memperkuat identitas budaya dan kearifan lokal (Wulandari, et al., 2020, p.14).

Kegiatan perencanaan pariwisata bahari yang dilaksanakan oleh aparat perencana di Kabupaten Bantaeng telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Daerah, di bawah kepemimpinan Bupati Bantaeng, berupaya menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan visi pembangunan daerah melalui pendekatan yang inklusif dan terstruktur. Salah satu kebijakan strategis yang diterapkan adalah alokasi kegiatan pembangunan berbasis desa dan kelurahan, di mana setiap desa mendapatkan lima kegiatan setiap tahun anggaran, sedangkan setiap kelurahan memperoleh sepuluh kegiatan per tahun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam menggerakkan pembangunan, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Bantaeng sebagai destinasi wisata unggulan (Yuliawan & Aly, 2020).

Penerapan pendekatan bottom-up di Kabupaten Bantaeng menjadi bentuk nyata bagaimana diplomasi maritim yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan. Dengan menjadikan masyarakat lokal sebagai mitra strategis, proses ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembangunan pariwisata bahari yang berkelanjutan.

Tantangan dalam Implementasi Bottom-Up Diplomasi Maritim

a) Kendala Sumber Daya

Keterbatasan dana dan sumber daya manusia merupakan tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, terutama di sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur. Tanpa dukungan finansial yang cukup, pembangunan infrastruktur, seperti jalan, fasilitas umum, atau sarana pendukung lainnya, sering kali tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia,

baik dari segi jumlah maupun kualitas, juga memperburuk situasi. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas program dan kemungkinan tidak tercapainya tujuan kebijakan secara maksimal (Yuliawan & Aly, 2020).

b) Kesadaran Masyarakat

Meskipun pendekatan bottom-up dirancang untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan pariwisata, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan warga mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga, mengelola, dan mempromosikan potensi pariwisata daerah. Masih banyak masyarakat yang kurang kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dalam menjaga kebersihan. Banyak masyarakat masih memandang pariwisata sebagai tanggung jawab pemerintah atau pihak luar, sehingga keterlibatan mereka sering kali terbatas pada menerima manfaat langsung, tanpa berpartisipasi dalam pengembangan atau pelestarian destinasi wisata (Rahmawati, 2015, p.121).

c) Partisipasi Masyarakat yang Kurang Konsisten

Masyarakat sering kali kurang terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini dapat terjadi karena minimnya akses terhadap informasi yang relevan, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami kebijakan tersebut atau dampaknya. Selain itu, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, yang mungkin dipicu oleh pengalaman negatif sebelumnya, korupsi, atau kurangnya transparansi, juga menjadi faktor penghambat partisipasi. Akibatnya, masyarakat merasa apatis atau enggan untuk berkontribusi, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas kebijakan serta mengurangi rasa kepemilikan mereka terhadap keputusan yang diambil (Abriani, et al., 2024, p.7).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kabupaten Bantaeng memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata bahari yang berfokus pada objek seperti Pantai Marina, didukung oleh keindahan alam, keanekaragaman budaya, dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan sektor ini. Pendekatan bottom-up yang inklusif menjadi strategi utama dalam kebijakan pembangunan, menempatkan masyarakat sebagai mitra aktif untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal. Penerapan diplomasi maritim melalui kerjasama lintas sektor juga memperkuat daya tarik wisata bahari dan mendorong pembangunan yang inklusif. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran

masyarakat, dan partisipasi yang kurang konsisten perlu diatasi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci keberhasilan untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan implementasi kebijakan yang terstruktur, Bantaeng memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi wisata bahari unggulan di Sulawesi Selatan.

DAFTAR REFERENSI

- Abriani, A., Nur, H., & Rizal. (2024). Dari Pantai Marina ke kesejahteraan: Strategi pariwisata berkelanjutan dalam membangun komunitas lokal. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4, 7.
- Berita Resmi Kabupaten Bantaeng. (2024, June). Wisata pantai dan air terjun di Bantaeng jadi penyumbang PAD terbesar. *Berita Resmi Kabupaten Bantaeng Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia*.
- Hamid, A. R. A., & Fattah, S. (2024). Peningkatan potensi pariwisata Alam Butta Toa adalah jembatan untuk menyejahterakan masyarakat dalam wujud rancangan peraturan daerah. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(1), 86-88.
- Hanggarini, P., Madjid, M. A., Perwita, A. A. B., & Wiranto, S. (2022). Budaya maritim dan diplomasi maritim untuk kepentingan nasional. *Indonesian Perspective*, 7(2), 170.
- Mawara, J. (2014). Bottom-up planning dalam pembuatan kebijakan pemerintah desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. 3.
- Nugraha, M. H. R., & Sudirman, A. (2016). Maritime diplomacy sebagai strategi pembangunan keamanan maritim Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 175-182.
- Rahmawati, R. W. (2015). Implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan. 121.
- Ramlan, A. R., Amri, A., Hamzah, A., Amiluddin, & Hasani, M. C. (2021). Valuasi ekonomi wisata bahari di Pantai Marina Kabupaten Bantaeng. *Ponggawa Journal of Fisheries Socio-Economic*, 60-70.
- Rompas, W. Y., & Pombengi, J. D. (2015). Implementasi pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. 57-58.
- Sanjiwani, N. P. A., et al. (2022). Upaya diplomasi maritim pemerintahan Joko Widodo dalam mewujudkan pilar keamanan poros maritim dunia. *Ijgd: Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(1), 27.
- Setiawan, A., & Zaman, A. N. (2020). Diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019. *Um Jakarta Press*.

- Supriyanto, E. E. (2022). Blue tourism: Treating marine ecosystems and increasing the potential of maritime tourism in Indonesia. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 16(2), 138-148.
- Wulandari, S., et al. (2020). Pariwisata, masyarakat dan kebudayaan: Studi antropologi pariwisata Pantai Marina di Pajukukang Bantaeng, Sulawesi Selatan. *Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event*, 2(1), 9-17.
- Yuliawan, D. R., & Aly, M. N. (2020, September 23). Perencanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. *Unair News*.